GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 masih terdapat kekurangan anggaran untuk belanja gaji ke tiga belas dan tunjangan ASN dikarenakan penyesuaian penganggaran gaji pegawai yang semula masih CPNS menjadi PNS, sehingga perlu mengakomodir kebutuhan mendesak dengan dilakukan perubahan terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terkait hal tersebut perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 1);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.957.185.341.219,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp11.503.301.659,00 (sebelas miliar lima ratus tiga juta tiga ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.945.682.039.560,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
f. Belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.486.436.363.990,12 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah dua belas sen) bertambah sebesar Rp55.944.215.392,00 (lima puluh lima miliar Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.542.380.579.382,12 (satu triliun lima ratus empat puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah dua belas sen).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.012.372.472.158,88 (dua triliun dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp67.793.866.642,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.428.402.849.685,88 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen).

2. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran X Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**10.753.535.391.163,00**	**10.753.535.391.163,00**	**0,00**
4.1.01	Pajak Daerah	9.067.500.000.000,00	9.067.500.000.000,00	0,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	820.000.000.000,00	820.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	820.000.000.000,00	820.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.001.00001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	820.000.000.000,00	820.000.000.000,00	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	0,00
4.1.01.02.001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	0,00
4.1.01.02.001.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	0,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.000.000.000.000,00	7.000.000.000.000,00	0,00
4.1.01.03.001	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	854.000.000.000,00	854.000.000.000,00	0,00
4.1.01.03.001.00001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	854.000.000.000,00	854.000.000.000,00	0,00
4.1.01.03.002	PBBKB-Bahan Bakar Solar	6.146.000.000.000,00	6.146.000.000.000,00	0,00
4.1.01.03.002.00001	PBBKB Bahan Bakar Solar	6.146.000.000.000,00	6.146.000.000.000,00	0,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.04.001	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.04.001.00001	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00
4.1.01.05.001	Pajak Rokok	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00
4.1.01.05.001.00001	Pajak Rokok	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
4.1.01.17.001	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
4.1.01.17.001.00001	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.01.18.001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.01.18.001.00001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.126.375.315.643,00	1.126.375.315.643,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.090.033.600.000,00	1.090.033.600.000,00	0,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.090.033.600.000,00	1.090.033.600.000,00	0,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.083.093.000.000,00	1.083.093.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.03.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.125.945.486.197,00	1.125.945.486.197,00	0,00
5.4.02.03.002.00001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.125.945.486.197,00	1.125.945.486.197,00	0,00
	Jumlah Belanja	**15.152.983.041.449,00**	**15.152.983.041.449,00**	**0,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-900.000.000.000,00**	**-900.000.000.000,00**	**0,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**900.000.000.000,00**	**900.000.000.000,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**900.000.000.000,00**	**900.000.000.000,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**900.000.000.000,00**	**900.000.000.000,00**	**0,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	14.252.962.041.449,00	14.252.962.041.449,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.753.514.391.163,00	10.753.514.391.163,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	9.067.500.000.000,00	9.067.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	820.000.000.000,00	820.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	820.000.000.000,00	820.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.001.00001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	820.000.000.000,00	820.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.02.001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.02.001.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.000.000.000.000,00	7.000.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.03.001	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	854.000.000.000,00	854.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.03.001.00001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	854.000.000.000,00	854.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.03.002	PBBKB-Bahan Bakar Solar	6.146.000.000.000,00	6.146.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.03.002.00001	PBBKB Bahan Bakar Solar	6.146.000.000.000,00	6.146.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.04.001	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.04.001.00001	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.05	Pajak Rokok	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.05.001	Pajak Rokok	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.05.001.00001	Pajak Rokok	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.17.001	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.17.001.00001	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.18.001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	

5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.575,00	24.575,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.209.600.000,00	3.209.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Hibah Berupa Uang

LAMPIRAN IIIa
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	0,00	2.581.700.000,00	2.581.700.000,00
2	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	51.176.490.000,00	48.594.790.000,00	-2.581.700.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	**51.176.490.000,00**	**51.176.490.000,00**	**0,00**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				
3	Sekolah SMK Swasta Se-Kaltim	Sekolah SMK Swasta Se-Kaltim	63.781.100.000,00	63.781.100.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	**63.781.100.000,00**	**63.781.100.000,00**	**0,00**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				
4	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SLB Swasta	-	3.401.260.000,00	3.401.260.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	**3.401.260.000,00**	**3.401.260.000,00**	**0,00**
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**118.358.850.000,00**	**118.358.850.000,00**	**0,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Pelayanan Informasi Publik				
5	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Jl. Jendral Sudirman Gedung B Kantor Gubernur Lt.3	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**
	Dinas Pemuda dan Olah Raga				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
198	DPP IKAPAKARTI KALTIM	Jln. KH. Wahid Hasyim II No.16 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
199	LEMBAGA MITRA PEMUDA KUTAI	Jl Yos Sudarso I Gg. Seroni Rt. 07 No. 131	171.427.200,00	171.427.200,00	0,00
200	PAGUYUBAN KELUARGA BOJONEGORO BONTANG (PAKUGORO)	JL. GENDANG 1 NO. 003 RT. 022 KELURAHAN BONTANG BARU KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG	135.713.200,00	135.713.200,00	0,00
201	IKATAN JAM'IYYAH TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT (IJ'TAMA)	JL. APT. PRANOTO GANG DAHLIA RT.56 DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR	35.714.000,00	35.714.000,00	0,00
202	Persatuan Tuna Netra Indonesia	Jl Telaga Sari rt 36 no 007, Kota Balikpapan	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00
203	BANK SAMPAH KANAL TIGA	Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur	64.285.200,00	64.285.200,00	0,00
204	Kutim Action Center	Jln K.H Ahmad Dahlan Gg Batara, No.70	107.142.000,00	107.142.000,00	0,00
205	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	Jalan Dayak Benuaq Blok E No. 14 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara	135.713.200,00	135.713.200,00	0,00
206	Yayasan Inovasi Membangun Bontang	Jl. A. Yani (Panahan) RT. 11 No. 45	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
207	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur	Serindit 1, Jl. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kota Samarinda	142.856.000,00	142.856.000,00	0,00
208	PW MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR	Jalan Teuku Umar Rt. 34 Blok. B No.14 Samarinda	135.713.200,00	135.713.200,00	0,00
209	PAGUYUBAN WAROK PONOROGO PERANTAUAN CABANG KUTAI TIMUR	I. Poros Kabo RT. 11 Gang Randu Putih 1B No.70 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur	71.428.000,00	71.428.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			**2.472.990.000,00**	**2.472.990.000,00**	**0,00**
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			**27.092.760.000,00**	**27.092.760.000,00**	**0,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

LAMPIRAN IIIb
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Hibah Berupa Barang/Jasa

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat					
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					
1	Masjid Nurul Iman		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	674.265.800,00	674.265.800,00	0,00
2	MASJID NURUL MUKMIN		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	399.855.300,00	399.855.300,00	0,00
3	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	1.316.132.600,00	1.316.132.600,00	0,00
4	DPC FSPTTH-FESDIKARI		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	637.323.500,00	637.323.500,00	0,00
5	NAHDLATUL ULAMA KOTA BALIKPAPAN		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	711.106.900,00	711.106.900,00	0,00
6	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRAFI TAPIS		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	929.827.600,00	929.827.600,00	0,00
7	Satuan Brimob Polda Kaltim		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	48.766.666.000,00	0,00	-48.766.666.000,00
8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	0,00	48.766.666.000,00	48.766.666.000,00
9	GBI KELUARGA IMAMAT RAJANI		1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	9.565.166.000,00	9.565.166.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
64	MASJID AL IKHLASH		Biaya Pengawasan Konstruksi	68.416.000,00	68.416.000,00	0,00
65	YAYASAN AL FATH SAMARINDA		Biaya Pengawasan Konstruksi	62.776.000,00	62.776.000,00	0,00
66	SURAU AL – KARIM		Biaya Pengawasan Konstruksi	39.760.000,00	39.760.000,00	0,00
67	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAIKH AL-HUSHRY		Biaya Pengawasan Konstruksi	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00
68	Masjid Babussa am		Biaya Pengawasan Konstruksi	99.747.000,00	99.747.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				**4.647.484.834,00**	**4.647.484.834,00**	**0,00**
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				**104.616.828.577,00**	**104.616.828.577,00**	**0,00**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IVa
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Bantuan Sosial Berupa Uang

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Sosial				
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)				
1	PA. Markazul Yatama	Jl. Poros Samarinda - Melak RT. 009 Desa Kota Bangun III	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00
2	LKSA Mishbaa Hun Munir	Jl. Gunung Pegat No. 60 RT. 40, Provinsi Kalimantan Timur	22.396.000,00	22.396.000,00	0,00
3	LKSA Daarurrahman	Dusun Sukodono RT.005, Kel. Sumber Sari, Kec. Loa Kulu	42.756.000,00	42.756.000,00	0,00
4	Yayasan PKBI Anaprasa	Jln. Long Bagun RT.11, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong	193.420.000,00	193.420.000,00	0,00
5	PA. Ar Rayyan	Jl. KH. Ahmad Muksin Gg. Kubur RT.003 No. 19 Kel. Melayu Tenggarong	19.342.000,00	19.342.000,00	0,00
6	PA Hidayatul Hayat Samboja	Jl. Merdeka RT 12 RW 04 Sungai Merdeka Samboja	28.504.000,00	28.504.000,00	0,00
7	LKSA Al-Hayat Samboja	Jl. Batuah RT 06 KM 36 Sei Merdeka Samboja	40.720.000,00	40.720.000,00	0,00
8	PA Raudathul Amin	Jln. Perjuangan Gg. Mutiara II RT.6, Kel. Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak	21.378.000,00	21.378.000,00	0,00
9	PA Nurul Islam	Jln. Muhammad Hatta Gg. Tirta Sari RT.38, Kel. Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00
10	LKSA Al Mukarram	Jl. Madinah Pasar Minggu Lama Rt 002 Desa Pait Kecamatan Long Ikis	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00
11	PA. Al-Bayan	Jl. Negara KM.144 Dusun Mariga RT.24 Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00
12	LKSA Mahligai Al-Qur"an Long Kali	Jalan Negara Km. 68 RT. 01 Sei Iman Kel. Long Kali Kab. Paser	101.800.000,00	101.800.000,00	0,00
13	LKSA Yayasan Ponpes Bina Alam dan Lingkungan Al Izzah	Jl. Pulau Limau RT. 07	30.540.000,00	30.540.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
108	LKSA Hubbul Wathan NWi	Jl. Gajah Mada Desa Padang Pangrapat Tanah Grogot	86.530.000,00	86.530.000,00	0,00
109	PA. Yaumiddin	Jl. Soekarno-Hatta KM 24 (Masuk Perjuangan) RT 45 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara	29.522.000,00	29.522.000,00	0,00
110	LKSA Ibnu Hanin	Jl. Siradj Salman RT. 27 No. 22	12.216.000,00	12.216.000,00	0,00
111	LKSA Ar-Rauf	Jln. Harun Nafsi RT.16, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir	36.648.000,00	36.648.000,00	0,00
112	LKSA Asih Manuntung	Jl. Ruhui Rahayu RT.01 Kel. Gn. Kelua Kec. Samarinda Ulu	22.396.000,00	22.396.000,00	0,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	**5.853.500.000,00**	**5.853.500.000,00**	**0,00**
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
113	Lansia Terlantar	Kalimantan Timur	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
114	Bantuan Sosial Uang Kepada Penyandang Disabilitas	Kalimantan Timur	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
115	Bantuan Sosial Terencana Kepada Anggota Veteran RI	Kalimantan Timur	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00
116	Bantuan Sosial Terencana Kepada Janda Veteran RI	Kalimantan Timur	385.500.000,00	385.500.000,00	0,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	**1.641.500.000,00**	**1.641.500.000,00**	**0,00**
		JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial	**7.495.000.000,00**	**7.495.000.000,00**	**0,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

LAMPIRAN IVb
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Bantuan Keuangan Umum

LAMPIRAN Va
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Bantuan Keuangan Khusus

LAMPIRAN Vb
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kab. Berau		4.730.283.605,00	4.730.283.605,00	0,00
2	Kota Bontang		88.856.911.200,00	88.856.911.200,00	0,00
3	Kab. Paser		100.804.702.751,00	100.804.702.751,00	0,00
4	Kota Balikpapan		139.188.961.000,00	139.188.961.000,00	0,00
5	Kab. Kutai Kartanegara		50.321.386.000,00	50.321.386.000,00	0,00
6	Kab. Penajam Paser Utara		62.992.982.000,00	62.992.982.000,00	0,00
7	Kab. Kutai Barat		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
8	Kab. Berau		5.015.270.603,00	5.015.270.603,00	0,00
9	Kab. Berau		3.379.489.254,00	3.379.489.254,00	0,00
10	Kab. Berau		154.394.932.763,00	154.394.932.763,00	0,00
11	Kab. Kutai Timur		27.491.465.300,00	27.491.465.300,00	0,00
12	Kota Samarinda		311.663.156.697,00	311.663.156.697,00	0,00
13	Kab. Mahakam Ulu		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
14	Kab. Berau		54.577.959.775,00	54.577.959.775,00	0,00
15	Kab. Paser		112.527.985.249,00	112.527.985.249,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			**1.125.945.486.197,00**	**1.125.945.486.197,00**	**0,00**
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			**1.125.945.486.197,00**	**1.125.945.486.197,00**	**0,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

LAMPIRAN VIa
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
1	Kab. Mahakam Ulu		28.635.831.400,00	28.635.831.400,00	0,00
2	Kab. Penajam Paser Utara		28.787.950.400,00	28.787.950.400,00	0,00
3	Kab. Kutai Barat		29.010.226.400,00	29.010.226.400,00	0,00
4	Kab. Kutai Timur		29.869.420.400,00	29.869.420.400,00	0,00
5	Kab. Berau		29.247.620.400,00	29.247.620.400,00	0,00
6	Kab. Paser		29.021.768.400,00	29.021.768.400,00	0,00
7	Kota Bontang		28.635.831.400,00	28.635.831.400,00	0,00
8	Kab. Kutai Kartanegara		29.631.945.400,00	29.631.945.400,00	0,00
9	Kota Balikpapan		29.382.240.400,00	29.382.240.400,00	0,00
10	Kota Samarinda		29.385.479.400,00	29.385.479.400,00	0,00
11	Kab. Kutai Barat		459.672.545.600,00	459.672.545.600,00	0,00
12	Kab. Penajam Paser Utara		13.544.600.000,00	13.544.600.000,00	0,00
13	Kab. Mahakam Ulu		7.727.106.000,00	7.727.106.000,00	0,00
14	Kab. Kutai Barat		12.925.542.000,00	12.925.542.000,00	0,00
15	Kab. Kutai Timur		22.027.858.000,00	22.027.858.000,00	0,00
16	Kab. Berau		16.787.356.000,00	16.787.356.000,00	0,00
17	Kab. Paser		17.453.308.000,00	17.453.308.000,00	0,00
18	Kab. Kutai Kartanegara		35.087.156.000,00	35.087.156.000,00	0,00
19	Kota Bontang		13.218.701.000,00	13.218.701.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
20	Kota Balikpapan		33.405.691.000,00	33.405.691.000,00	0,00
21	Kota Samarinda		37.822.682.000,00	37.822.682.000,00	0,00
22	Kab. Kutai Timur		1.012.366.259.600,00	1.012.366.259.600,00	0,00
23	Kab. Mahakam Ulu		122.821.590.600,00	122.821.590.600,00	0,00
24	Kab. Penajam Paser Utara		162.277.667.600,00	162.277.667.600,00	0,00
25	Kab. Berau		470.147.474.600,00	470.147.474.600,00	0,00
26	Kab. Paser		369.282.175.600,00	369.282.175.600,00	0,00
27	Kab. Kutai Kartanegara		627.809.544.600,00	627.809.544.600,00	0,00
28	Kota Bontang		209.344.800.600,00	209.344.800.600,00	0,00
29	Kota Balikpapan		361.821.249.600,00	361.821.249.600,00	0,00
30	Kota Samarinda		467.348.377.600,00	467.348.377.600,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			**4.764.500.000.000,00**	**4.764.500.000.000,00**	**0,00**
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			**4.764.500.000.000,00**	**4.764.500.000.000,00**	**0,00**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

LAMPIRAN VIb
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

LAMPIRAN VIc
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH MINYAK DAN GAS BUMI*)

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN.KELOMPOK, JENIS,OBJEK DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

No	RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH MINYAK DAN GAS BUMI	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi	Uraian	Lokasi	Uraian	Lokasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data Laporan Kosong											

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi	Uraian	Lokasi	Uraian	Lokasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data Laporan Kosong											

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009